



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara virtual
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 13 Juli 2021
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas kebijakan vaksinasi COVID-19; 2. Membahas perkembangan pelaksanaan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong; 3. Laporan perkembangan penanganan COVID-19 setelah sepekan PPKM darurat; 4. Membahas penanganan kelangkaan oksigen; 5. Membahas penanganan kelangkaan obat dalam masa pandemi COVID-19.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 3 orang Virtual 44 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU.; C. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dibuka pukul 10.05 WIB., dilaksanakan secara virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi penundaan pelaksanaan Program Vaksinasi Gotong Royong individu. Selanjutnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan kajian intensif terkait penyempurnaan pelaksanaan Program tersebut.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk:
 - a. mengutamakan percepatan vaksinasi program terutama di daerah-daerah zona merah;
 - b. memperbaiki distribusi vaksin dari pusat ke daerah;
 - c. memperbanyak sentra vaksinasi guna mempermudah masyarakat mengakses vaksinasi; dan
 - d. memastikan percepatan pemberian honorarium vaksinator.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera memperbaiki kebijakan penanganan pasien COVID-19 isolasi mandiri (isoman) dengan memperhatikan seluruh masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya:
 - a. Memperluas penyedia layanan telemedicine;
 - b. Membuat mekanisme bagi isoman yang tidak bisa menjangkau telemedicine;
 - c. Menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat Pemerintah;
 - d. Bekerjasama dengan Satgas COVID-19 dan Pemerintah Daerah untuk secara aktif dan proaktif mengawasi kesehatan pasien isoman;
 - e. Menyosialisasikan panduan isoman yang benar secara masif dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memperkuat sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan respon kedaruratan pandemi COVID-19 melalui:
 - a. Memastikan kecukupan tempat tidur rumah sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat;

- b. Meningkatkan perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19, termasuk test PCR berkala, nutrisi, APD, jam kerja, insentif tepat waktu dan lain-lain;
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan di luar Pulau Jawa dan Bali menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19;
 - d. Mengoptimalkan tata laksana penanganan pasien COVID-19 untuk meningkatkan angka kesembuhan.
5. Demi meningkatkan kualitas data testing dan tracing di Indonesia, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan agar data specimen pemeriksaan COVID-19 yang menggunakan metode Nucleic Acid Amplification Test (qRT PCR, TCM Isothermal, TCM Non Isothermal, dan LAMP) masuk ke dalam New All Record (NAR).
 6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk memaksimalkan pengawasan post market guna mengawal distribusi obat-obatan COVID-19 di setiap daerah sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
 7. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI baik sendiri maupun bersama aparat penegak hukum mengintensifkan pengawasan dan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha dan distributor obat-obatan COVID-19 agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 8. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI, paling lambat tanggal 22 Juli 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.00 WIB.

Jakarta, 13 Juli 2021

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

ttd

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A-35